BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik di antara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.¹

Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya. Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia. Disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-*A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.²

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan di antara mereka.

Dalam QS. Al-Ghasiyah: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan". (QS. Al-Ghasiyah: 22)³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010, h. 2

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.215

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014, h.500.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai kebaikan dan kejahatan, yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.⁴

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan.⁵

Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).⁶

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.361

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.90

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Alma'arif, 1987, h.10.

baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁷

Menurut Abu Hanifah upah wajib dibayarkan ketika pekerjaan itu tidak disyaratkan apapun dalam akad. Bahwa upah tidak wajib (menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam tanggungan), kecuali pada akhir masa ijarah. Hal itu karena manfaat yang bisa dicapai dalam masa ijarah. Di lihat dari statusnya sebagai *ma'quudalaih* adalah satu bagian. Jadi, jika ia tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib memberikan gantinya (upah).⁸ Pendapat Imam Malik dalam hal ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya didasarkan kepada imbalan yang diterima (pekerjaan).⁹

Berkaitan tentang hal ini di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati merupakan Desa yang penduduknya banyak menjadi peternak burung lovebird. Maka kebanyakan para peternak burung lovebird banyak yang melolohkan atau memberi makan kepada anakan burungnya dititipkan kepada orang lain atau yang sering disebut dengan istilah “nyepet”. Hal ini disebabkan karena kesibukan pemilik yang tidak memiliki waktu untuk meloloh sendiri. Biasanya para peternak akan memberi upah sebesar Rp 50.000 pada setiap burung yang dilolohnya. Pemilik burung akan mengambil anakan burung pada saat burung tersebut sudah makan sendiri.¹⁰

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Pagerharjo adalah pembayaran upah yang diberikan di akhir yaitu pada saat burung diambil. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para peloloh burung di Desa Pagerharjo. Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak, di mana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan pekerjaan kepada *musta'jir* namun *musta'jir* meminta upah atas pekerjaan yang sudah dikerjakannya namun tidak terkait dengan lamanya waktu. Tentunya hal

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h.488

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.413

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-syifa, 1990, h.216

¹⁰ Wawancara dengan peternak lovebird, Fathoni Tanggal 20 Agustus 2018

tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh *musta'jir* terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh *mu'ajir*, misalnya dalam segi waktu pemilik burung A melolohkan burung pada usia 3 hari, pemilik burung B melolohkan burung pada usia 14 hari (dua minggu) namun pemilik A dan pemilik B sama-sama memberikan jasa sebesar Rp. 50.000.¹¹

Dalam hal ini akan diteliti apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan perbedaan waktu yang terjadi, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Jasa Perawatan Anak Burung Lovebird di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Jasa Perawatan Anak Burung Lovebird di Desa Pagerharjo Wedarijaksa Pati”, maka penulis memfokuskan penelitiannya pada pembayaran upah jasa/standar gaji antara pemberi upah (*mu'ajir*) dengan penerima upah (*musta'jir*) ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

¹¹ Wawancara dengan peternak lovebird, Moh Sholeh, 23 Agustus 2018.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wearijaksa Kabupaten Pati.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah jasa perawatan anak burung lovebird di Desa Pagerharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran upah mengupah yang baik dan benar menurut hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.E. pada Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari; halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman daftar riwayat hidup, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I atau pendahuluan terdiri latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II yakni kajian pustaka yang terdiri dari akad (perjanjian) menurut hukum Islam, Upah menurut Hukum Islam, Hasil penelitian tedahulu dan kerangka berfikir.

BAB III yakni jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV yakni Analisis hasil penelitian terdiri dari gambaran umum Desa Pagerharjo dan analisis tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah jasa.

BAB V yakni Penutup yang terdiri dari hasil kesimpulan, saran dan penutup dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

3. Bagian akhir, meliputi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.